



RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA BANDUNG
TAHUN 2020 - 2024




KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA BANDUNG
Jl Soekarno Hatta No 498 Bandung Tlp 022 750592

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA BANDUNG
JL. SOEKARNO HATTA NO. 498 BANDUNG

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Bandung (Renstra Kementerian Agama Kota Bandung) disusun berdasarkan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat sebagai rujukan utama dalam penyusunan Renstra ini dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Dalam proses penyusunannya, Renstra Kementerian Agama Kota Bandung menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Renstra Kementerian Agama Kota Bandung tahun 2020-2024 ini memuat tujuan, sasaran, target kinerja, pendanaan dan strategi Kementerian Agama Kota Bandung selama 5 (lima) tahun mendatang tahun 2020-2024 yang dimulai dari Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Renstra Kementerian Agama Kota Bandung tahun 2020-2024 agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra di daerah dilingkungan Kementerian Agama Kota Bandung serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja seperti MAN dan MTsN dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kementerian Agama Kota Bandung ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan sepanjang tahun 2020-2024 khususnya di wilayah Kota Bandung.

Bandung, September 2020

Kepala Kementerian Agama Kota Bandung

Dr. H. YUSUF, M.Pd

NIP.196408041988031001



RENSTRA 2020 -2024
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANDUNG

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG
NOMOR: 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG
TAHUN 2020 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya program kerja lima tahunan Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2015-2019 perlu disusun rencana program strategis lima tahunan yang baru tahun 2020-2024 yang sesuai dengan program kerja Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- b. bahwa rencana strategis sangat diperlukan sebagai pedoman, arah sasaran yang jelas dan tolok ukur kinerja dalam melaksanakan tugas pelayanan bidang agama pada masyarakat;
- c. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2020 -2024
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020–2024

MEMUTUSKAN ,...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TAHUN 2020-2024
- Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020-2024 dan Lampiran-lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang agama pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini maka Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020-2024 yang baru ini sebagai pedoman seperti dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan revisi kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal, 31 September 2020
KEPALA



Dr. H. YUSUF, M.Pd
NIP. 196408041988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	3
1.1.2 Harmoni Sosial dan Kerukunan Umat Beragama	4
1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	7
1.1.4 Peningkatan Kualitas, Pendidikan Agama dan Keagamaan	13
1.1.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Tingkat Kota Bandung	15
1.1.6 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintah yang Bersih dan Berwibawa	17
1.1.7 Evaluasi Atas Pencapaian Kinerja Kegiatan Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2015-2019	19
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	20
1.2.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama Dalam Menjalankan Ibadah	20
1.2.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama Dan Kerukunan Umat Beragama	22
1.2.3 Peningkatan Umat Beragama Yang Menerima Layanan Keagamaan	22
1.2.4 Peningkatan Budaya Birokrasi Kepemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif	23
1.2.5 Peningkatan Peserta Didik Yang Memperoleh Layanan Pendidikan Berkualitas	24
1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG	25
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	30
2.1 TUJUAN	30
2.2 SASARAN	30
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	49
3.1 TARGET KINERJA	49
3.1.1 Program Bimbingan Masyarakat Islam	50
3.1.2 Program Pendidikan Islam	51
3.1.3 Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah	52
3.1.4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	53
3.1.5 Program Kerukunan Umat Beragama	54
3.2 KERANGKA PENDANAAN	63
BAB IV PENUTUP.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pemeluk Agama Kota Bandung Tahun 2019.....	4
Tabel 2	Data Pemeluk Agama dan Rasio Rumah Ibadah di Kota Bandung Tahun 2019	4
Tabel 3	Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Bandung Tahun 2019.....	5
Tabel 4	Eta Kerawanan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bandung Sampai dengan 2019.....	6
Tabel 5	Daftar Rincian Penerimaan Zakat Kota Bandung	9
Tabel 6	Jumlah KUA Memenuhi Standar Di Kota Bandung	10
Tabel 7	Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk di Kota Bandung.....	11
Tabel 8	Jumlah Penghulu yang memenuhi Kompetensi.....	12
Tabel 9	Tunjangan Profesi Non PNS 2015-2019.....	13
Tabel 10	Jumlah Santri Penerima Beasiswa/BOS.....	13
Tabel 11	Jumlah Pontren Penerima Bantuan Operasional.....	14
Tabel 12	Jumlah Siswa MI Penerima BOS	14
Tabel 13	Jumlah Siswa MTs Penerima BOS	14
Tabel 14	Jumlah Siswa MA Penerima BOS.....	14
Tabel 15	Jumlah Guru Non PNS Penerima TPG di Madrasah.....	14
Tabel 16	Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunj Fungsional di Madrasah	15
Tabel 17	Jumlah Penaftaran dan Pembinaan Haji	16
Tabel 18	Data Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2019	18
Tabel 19	Data PNS berdasarkan Unit Kerja dan Jabatan	19
Tabel 20	Analisis SWOT Kualitas Umat Beragama	21
Tabel 21	Sasaran Kegiatan Tujuan 1.....	30
Tabel 22	Sasaran Kegiatan Tujuan 2.....	30
Tabel 23	Sasaran Kegiatan Tujuan 3.....	31
Tabel 24	Sasaran Kegiatan Tujuan 4.....	32
Tabel 25	Sasaran Kegiatan Tujuan 5.....	33
Tabel 26	Sasaran Kegiatan Tujuan 6.....	33
Tabel 27	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.....	35
Tabel 28	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.....	55
Tabel 29	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020-2024	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah Pemeluk Agama Kota Bandung 2019	4
Gambar 2	Kegiatan Fucus Group Discusion yang diikuti oleh seluruh Agama dalam rangka tetap menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bandung	7
Gambar 3	Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan Penghargaan ke Wali Kota Bandung Oded M Danial sebagai Juara Umum STQH XVI tingkat Jabar 2019	8
Gambar 4	Baznas Kota Bandung menyalurkan Rp 1,1 miliar lebih dana zakat kepada 929 penerima pada tahun 2018 yang diantaranya dari zakat ASN.	9
Gambar 5	Sosialisasi Pendaftaran Tanah Wakaf Tahun 2019.....	10
Gambar 6	Ikatan perjanjian pernikahan oleh Peghulu.....	11
Gambar 7	Alur Pelayanan Nikah.....	11
Gambar 8	Bimbingan Manasik Haji.....	17
Gambar 9	Susunan Organisasi Kementerian Agama Kota Bandung.....	26
Gambar 10	Susunan Organisasi Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020.....	27

BAB I PENDAHULUAN

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dalam BAB. I menjelaskan kondisi umum, potensi dan permasalahan yang ada di Kementerian Agama Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Agama Kota Bandung merupakan Instansi Vertikal yang **tugasnya** (sesuai PMA Nomor 19 tahun 2019 pasal 7) adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota (Kota Bandung) berdasarkan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Jawa Barat) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud kantor Kementerian Agama Kota Bandung (pasal 8) menyelenggarakan **fungsi**:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di lingkungan Kota Bandung;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, zakat dan wakaf.
- d. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kota Bandung.

1.1. KONDISI UMUM

Kementerian Agama Kantor Kota Bandung merupakan satu Instansi Vertikal Kementerian Agama R.I yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan tingkat II, sebagai Instansi Vertikal Kementerian Agama Kantor Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Kementerian Agama Kantor Kota Bandung juga berada dalam wilayah daerah otonom kota Bandung sehingga dalam melaksanakan pelayanan tugasnya juga perlu mendukung program-program yang dicanangkan oleh kepala daerah yaitu Walikota Bandung yang salah mottonya *Bandung Agamis*. Bentuk tanggung jawab Kementerian Agama Kota Bandung dalam hal pelayanan bidang agama tidak terlepas dari tugas pokok kementerian agama yaitu menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun

Program pembangunan bidang agama dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dilaksanakan melalui peningkatan pemahaman pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan,

peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan, pengembangan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Agama RI. Tahun 2020-2024 sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kementerian Agama melalui kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kehidupan beragama di Kota Bandung

Visi Kementerian Agama R.I sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020 -2024 adalah **“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**. Sedangkan misinya adalah :

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sedangkan visi misi Kementerian Agama periode Tahun 2015 -2019 sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2015 -2019 mempunyai visi : **“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. dengan upaya pencapaiannya melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya

Visi dan misi rentra tahun 2015-2019 tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan guna memudahkan realisasi dan pencapaiannya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;

7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Kementerian Agama Kantor Kota Bandung dalam melaksanakan tugas tersebut merumuskan berbagai kegiatan yang selaras dengan program-program yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan juga mengapresiasi visi misi Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang agamis .

Program strategis Kementerian Agama Kota Bandung pada periode tahun 2015-2019 adalah berprinsip dalam upaya untuk meningkatkan penghayatan, pendalaman spiritual dan etika keagamaan, maka sesuai dengan Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sasaran utamanya adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan.
4. Meningkatkan mutu pelayanan haji.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

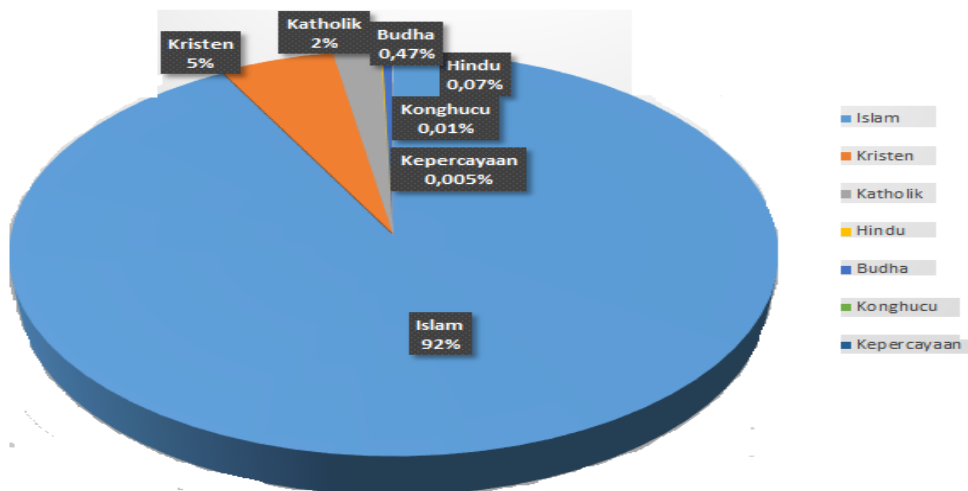
Pencapaian Kinerja Kegiatan Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2015-2019

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang Agama di Kota Bandung, pada Kementerian Agama Kota Bandung selama ini digambarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, dari hasil evaluasi dalam Renstra sebelumnya (Renstra 2015-2019) capaian kinerja Kementerian Agama Kota Bandung rata-rata pertahun sudah mencapai 100%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja aparatur Kementerian Agama Kota Bandung sudah bekerja secara optimal dan dilaksanakan sesuai tusinya dengan baik, pencapaian peningkatan dimaksud sesuai sasaran utamanya sebagai berikut :

1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator: 1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku, dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Jumlah Pemeluk Agama Kota Bandung 2019



Gambar 1
Jumlah Pemeluk Agama Kota Bandung 2019

Tabel 1
Jumlah Pemeluk Agama Kota Bandung Tahun 2019

Agama	Jumlah
Islam	2.269.680
Kristen	130.504
Katholik	54.067
Hindu	1.675
Budha	11.607
Konghucu	167
Kepercayaan	121
Total	2.467.821

Tabel 2
Data Pemeluk Agama dan Rasio Rumah Ibadah di Kota Bandung Tahun 2019

Agama	Jumlah Pemeluk Agama	Jumlah Rumah Ibadah	Rasio Jumlah Pemeluk Agama
Islam	2.269.680	3.862	1 : 587
Kristen	130.504	129	1: 1.011
Katholik	54.067	54	1: 1.011
Hindu	1.675	5	1 : 335
Budha	11.607	21	1 : 552
Konghucu	167	1	1 : 167
Kepercayaan	121	-	-
Total	2.467.821	4.072	1: 606

1.1.2 Harmoni Sosial dan Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Kota Bandung serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kota Bandung yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas

agama, knowledge sharing aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat Bergama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa : (1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) provinsi dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama di Kota Bandung. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif. Capaian indeks KUB Tahun 2015 – 2019 di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut

Tabel 3
Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Bandung Tahun 2019

Tahun	Nilai
2015	-
2016	-
2017	72.5 %
2018	74.7 %
2019	73.5 %

Capaian indeks Kerukunan Umat Beragama pada Tahun 2018 sebesar 74,7 % atau naik sebesar 2 % dan menurun di tahun 2019 sebesar 1,2 %. Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kota Bandung masih cenderung stabil dan di atas capaian indeks tingkat provinsi (68,5 %). Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama di Kota Bandung cukup baik dan akan terus di tingkatkan dengan peran aktif semua stakeholder melalui pembinaan dan komunikasi secara intens antar tokoh – tokoh umat beragama.

Indikator kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Konflik yang terjadi pada umumnya dipicu adanya kurangnya komunikasi dan kesalahpahaman. Kantor Kementerian Agama selalu hadir pada setiap konflik yang terjadi untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian. Adapun jumlah konflik yang terselesaikan selama kurun waktu 2015 -2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Eta Kerawanan Kerukuan Umat Beragama di Kota Bandung Sampai dengan 2019

Jenis Pemicu	Tahun	Daerah	Keterangan
Ahmadiyah	2017	Kec. Cibeunying Kaler	Pada tahun 2017 terjadi demo berkaitan acara ibadah di Masjid Mubarak JAI sehingga memicu terjadinya ketegangan antara jamaah JAI serta umat islam
		Kec. Astanaanyar	Terjadi ketegangan antara JAI dengan warga sekitar terkait pelaksanaan ibadah di masjid An-Nasher JAI Astanaanyar
Syiah	2018	Kec. Regol	Terjadi demo dari LSM Annas terhadap acara Asyura yang diselenggarakan ABI (syiah) Jawa barat
	2019	Kec. Margacinta	Terjadi demo dari LSM Annas, PAS terhadap acara Asyura yang diselenggarakan anggota dan keluarga simpatisan syiah Jawa barat
	2020	Kec. Sukasari	Terjadi demo dari LSM Annas, PAS terhadap acara Asyura (Syiah) yang diselenggarakan oleh LSM yang mengatasnamakan Lembaga Seni dan Budaya “ Kabuyutan Dayeuh Luhur Gegerkalong “
Pendirian Rumah Ibadah		<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Astanaayyar • Kec. Gedebage • Kec. Cinambo • Kec. Kiaracandong • Kec. Bojongloa Kidul 	Tahun 2015 – 2019 di beberapa daerah Kota Bandung terjadi demo/ tidak mendapat persetujuan warga karena dianggap tidak memenuhi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 pasal 14 tentang persyaratan administrasi 90 dan 60 orang.

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi beragama, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Kota Bandung, adalah fakta masyarakat Kota Bandung yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan

problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama di Kota Bandung.

Kegiatan pembinaan kerukunan hidup umat beragama dilaksanakan melalui Program Kerukunan Umat Beragama, pelaksanaannya antara lain dengan cara kampanye “ *hidup rukun dengan kehidupan beragama*” kegiatannya antara lain dengan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti seluruh unsur agama dan pemberian bantuan operasional KUB.

Untuk tetap menjaga tingkat toleransi yang sudah baik, Kementerian Agama Kota Bandung memberdayakan tenaga penyuluh agama yang ada, yaitu penyuluh agama Islam dan yang non muslim seperti Kristen, Katolik dan Hindu, selama tahun 2015-2019 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama sepanjang tahun 2015-2019 sebanyak 5 kali (tergantung anggaran tersedia)
2. Peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama;
3. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media;
4. Pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.
5. Pembinaan Aliran Keagamaan.



Gambar 2
Kegiatan Fucus Group Discusion yang diikuti oleh seluruh Agama dalam rangka tetap menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bandung

1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Pembangunan Agama merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, maju, mandiri dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan penuh toleransi, selaras, seimbang, dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu pembangunan agama menjadi prioritas dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, indikator capaian dalam pelayanan untuk peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kementerian Agama Kota Bandung dilaksanakan melalui program Bimbingan Masyarakat Islam dengan kegiatan periode Tahun 2015 -2019 sebagai berikut :

a. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

- 1) Tersedianya tenaga Penyuluh di Kota Bandung, baik PNS maupun Penyuluh Agama Honorer hingga tingkat Kecamatan, Jumlah penyuluh agama tahun 2020 sebanyak : PNS= 104 orang dan PAH/Honorer=242 orang . Jumlah penyuluh honorer periode

tahun 2015-2019 sebanyak 495 orang (selama Tahun 2015 sd. 2016) dan 242 orang (selama 2017 sd. 2019) dan semuanya sudah dibayarkan tunjangannya tunjangan 100% sudah terbayarkan, sedang untuk penyuluh PNS sudah dibayar melalui Gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerjanya setiap bulan (100 % terbayar). Sejak tahun 2017 ada pengurangan tenaga penyuluh karena ada penyesuaian kenaikan tarif honor bulanan sehingga terpaksa harus seleksi ulang sebagai solusinya. ini tersebar di 30 Kecamatan untuk melayani pemeluk agama Kota Bandung yang berjumlah sebanyak 2,467,821 orang.

Catatan: Untuk penyuluh non Muslim anggaran masih di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

- 2) Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur an dan Musabaqah Tilawatil Qur an (MTQ) tingkat Kota Bandung dan mengawalnya untuk tingkat Provinsi, hampir setiap tahun STQ dan MTQ Kota Bandung selalu berprestasi dan untuk STQ ke XII Tahun 2015 sampai dengan STQ ke XVI tahun 2019 Kota Bandung keluar sebagai Juara Umum Tingkat Provinsi Jawa Barat. Selama tahun 2015-2019 pelaksanaan STQ telah berjalan tiap tahunnya, jadi 100% sudah terlaksana kegiatannya. Sementara untuk MTQ, Kota Bandung telah berhasil menjadi juara umum Tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak delapan kali berturut-turut. Dimana pada tahun 2020 Kota Bandung berhasil menjadi juara umum yang kedepalan kali pada MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat yang Ke-XXXVI di Kabupaten Subang.
- 3) Terlaksananya peningkatan lembaga dakwah melalui kegiatan pembinaan Lembaga Dakwah seperti Bantuan Majelis Talim, sepanjang tahun 2015 sd. 2019 telah membina 20 lembaga dakwah (setiap tahun 4 lembaga dakwah disesuaikan dengan anggaran tersedia) terlaksana sesuai targetnya adalah 100%.



Gambar 3
Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan Penghargaan ke Wali Kota Bandung Oded M Danial sebagai Juara Umum STQH XVI tingkat Jabar 2019

b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

- 1) Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Materi Penyuluhan Zakat melalui pencetakan dan pendistribusian buku peraturan tentang Zakat, pada pengelolaan zakat tahun 2019 terkumpul dana zakat sebesar Rp. 90.754.696.012,- dengan rincian adalah Zakat fitrah terkumpul mencapai Rp.64.364.0207.579,00, Zakat Maal Rp.560.816.952,- Infak Rp.124.051.539,- dan Shodaqoh/penerimaan lainnya Rp.25.705.806.942,-.

Tabel 5
Daftar Rincian Penerimaan Zakat Kota Bandung

No	Rincian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Penerima Zakat Fitrah			
	a. Beras (Kilogram)	404.334	508.587	-
	b. Uang (Rupiah)	51.060.559.810	51.625.567.542	64.364.020.579
2	Penerima Zakat maal (Rupiah)	19.710.888.166	23.586.851.912	560.816.952
3	Penerima Infaq (Rupiah)	37.958.548	151.253.043	124.051.539
4	Penerima Shodaqoh (Rupiah)	-	255.146.892	-
5	Penerima Lainnya (Rupiah)	-	-	25.705.806.942
Jumlah Penerimaan		70.809.406.524	75.618.819.389	90.754.696.012



Gambar 4
Baznas Kota Bandung menyalurkan Rp 1,1 miliar lebih dana zakat kepada 929 penerima pada tahun 2018 yang diantaranya dari zakat ASN.

- 2) Mengakreditasi Lembaga Zakat dan pengamanan tanah wakaf melalui legalitasi/sertifikasi tanah wakaf di wilayah kota Bandung, data lokasi tanah wakaf sd. Tahun 2019 tercatat di 30 Kecamatan se Kota Bandung sebanyak 2.353 lokasi dengan total luas 627.859 m², yang sudah bersertifikat 2.011 lokasi (86 %) dengan luas 570.929 m² (91 %). Dari sisi lokasi, sejak tahun 2015 sd. 2019 rencana melegalisasi 4 lokasi per tahun, tapi pada tahun 2019 hanya terealisasi 2 lokasi, total rencana 20 lokasi terealisasi 18 lokasi (tercapai 90%.)
- 3) Terlaksananya bantuan operasional BWI dan BAZNAS tercapai 100% sesuai anggaran tersedia.

- 4) Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf melalui kegiatan Pengawasan Lembaga Zakat di 5 lokasi, tercapai 100% (tergantung anggaran tersedia).



Gambar 5
Sosialisasi Pendaftaran Tanah Wakaf Tahun 2019.

c. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit teknis Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Jumlah KUA tahun 2019 di Kota Bandung berjumlah 30 KUA Berdasarkan kondisi bangunan terdapat 4 unit telah memiliki gedung dan lahan sendiri, 26 KUA belum memiliki lahan sendiri. Untuk kondisi Bangunan; 20 KUA kondisi masih baik, 6 KUA kondisi rusak ringan, 4 kondisi KUA rusak berat.

Tabel 6
Jumlah KUA Memenuhi Standar Di Kota Bandung

KUA	Jumlah
KUA telah memiliki gedung dan lahan sendiri	4
KUA belum memiliki lahan sendiri	26
KUA kondisi masih baik	20
KUA kondisi rusak ringan	6
KUA kondisi rusak berat.	4

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat KUA memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan sebesar Rp. 60.000.000 per-tahun (Tipologi A), Rp. 48.000.000 per-tahun (Tipologi B), dan Rp. 40.800.000 per-tahun untuk (Tipologi C).

Disamping pelayanan administrasi keagamaan di KUA juga terdapat berbagai jenis bentuk dan jenis layanan lain seperti layanan Produk Halal, layanan Hisab Rukyat, layanan Data dan Informasi Keagamaan, konsultasi Keluarga Sakinah, Zakat Wakaf serta Bimbingan Manasik Haji. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan fasilitas SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), SIMAS (Sistem Informasi Masjid), SIM Penghulu (Sistem Informasi Penghulu), dan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf).

Jumlah Nikah dan Rujuk di wilayah Kota Bandung sepanjang tahun 2015-2019 sebanyak 88.072 peristiwa, atau rata-rata dalam setahun mencapai 17.614 peristiwa.

Tabel 7
Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk di Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah (30 Kecamatan)
1	2015	17.182
2	2016	16.849
3	2017	17.847
4	2018	18.482
5	2019	18.072
Total		88.072
Rata-Rata		17.614



Gambar 6
Ikatan perjanjian pernikahan oleh Peghulu



Gambar 7
Alur Pelayanan Nikah

Disamping pelayanan adminitrasi keagamaan di KUA juga terdapat berbagai jenis bentuk dan jenis layanan lain seperti layanan bimbingan manasik haji, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, konsultasi keluarga sakinah. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan fasilitas SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), SIMAS (Sistem Informasi Masjid), SIM Penghulu (Sistem Informasi Penghulu).

Capaian dalam pelayanan pengelolaan urusan agama Islam sepanjang tahun 2015-2019 adalah :

- 1) Terlaksananya Peningkatan SDM Penghulu melalui kegiatan Pembinaan Fiqih Munakahat sebanyak 150 orang
- 2) Terlaksananya Peningkatan Layanan KUA melalui pembayaran Jasa Layanan Profesi dan Transport Penghulu dalam Layanan Nikah di Luar Kantor mencapai 90%
- 3) Terlaksananya Peningkatan Layanan KUA melalui Tambahan Biaya Operasional KUA yang bersumber dari Anggaran PNPB , dari tahun 2015 sd. 2016 biaya operasional Rp.3.000.000/bulan, sejak tahun 2017 sd. 2019 naik menjadi Rp.4.000.000/bulan.
- 4) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Layanan KUA melalui kegiatan Supervisi PNPB terhadap 30 KUA mencapai 80% (rata-rata 24 KUA/tahun, tergantung anggaran tersedia.)
- 5) Terlaksananya koordinasi dan pemantapan pelaksanaan tugas melalui kegiatan Rapat-rapat dalam kantor 12 kali setiap tahun.
- 6) Terlaksananya Pemberdayaan Masjid melalui kegiatan Pendataan Masjid, sepanjang tahun 2015-2019 telah mengkalibrasi sebanyak 152 masjid
- 7) Terlaksananya Bimbingan Perkawinan Pra Nikah melalui kegiatan Pembinaan Perkawinan bagi Calon Pengantin, tahun 2015-2019 berjumlah sekitar 77.476 pasang, sedang pelaksanaan di Kantor Kemenag Kota Bandung untuk tahun 2018-2019 sebanyak 2.300 pasang
- 8) Terlaksananya operasional pelayanan dan pemeliharaan KUA sebanyak 30 KUA/tahun
- 9) Terlayannya pelayanan Hisab Rukyat sebanyak 152 pengukuran arah kiblat masjid dan Produk Halal dan produk syariah lainnya sebanyak 58 konsultasi.

Tabel 8
Jumlah Penghulu yang memenuhi Kompetensi

Tahun	Nilai
2015	82.26
2016	82.67
2017	84.85
2018	85
2019	85.05

1.1.4 Peningkatan Kualitas, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pendidikan Agama seharusnya menjadi pelajaran utama jika ingin mencetak generasi unggul pembawa perubahan, karena para tunas bangsa ini di semai di madrasah/sekolah. Nutrisi yang baik akan menjadikan mereka tumbuh dan berkembang dengan baik yang akan menjadikan mereka pribadi tangguh berbudi pekerti luhur.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di Kementerian Agama Kota Bandung dicapai melalui Program Pendidikan Agama, sesuai peraturan Menteri Agama yang berperan sebagai penggerak di Kementerian Agama Kota Bandung leading sektornya adalah di Seksi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Untuk agama non muslim ada Pengawas Pendidikan Katolik dan juga Pengawas Pendidikan Kristen, sedang Hindu, Budha dan Konghucu masih langsung dari tingkat Provinsi mengingat prosentase penganutnya sedikit. Capaian program pendidikan Islam kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam, dicapai melalui layanan manajemen pendidikan 3 layanan/tahun, pemberian penghargaan bagi guru yang berprestasi 50 guru, standarisasi kurikulum 13 kepada guru PAI dan telah memberikan tunjangan profesi non PNS sejak tahun 2015-2019 yaitu Sebagai berikut:

Tabel 9
Tunjangan Profesi Non PNS 2015-2019

No	Uraian	Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Target	254	252	252	265	245
2	Realisasi	254	158	0	265	245
3	Persentase Capaian	100%	63%	0%	100%	100%

Capaian rata-rata dalam 5 tahun (2015-2019) = 73%

2. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam, pelaksanaan kegiatannya tahun 2015-2019 meliputi pembinaan dan monitoring yang secara rutin dilaksanakan minimal 2 kali/tahun, bantuan BOS untuk santri Pondok Pesantren rata-rata 560 per tahun untuk santri tingkat Wustha dan 82 santri per tahun untuk tingkat Ula, bantuan sarana prasarana 2 lembaga/tahun (sesuai anggaran) dan operasional pendidikan terhadap rata-rata 22 Pesantren/tahun dalam rangka kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren diwilayah kota Bandung. Sejak mulai tahun anggaran 2019 santri di Pondok Pesantren menerima juga dana PIP sebanyak 461 santri diberbagai tingkatan untuk tahun 2019.

Tabel 10
Jumlah Santri Penerima Beasiswa/BOS

No	Uraian	Jumlah Santri Penerima Beasiswa/BOS				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Target	436	518	390	707	720
2	Realisasi	436	518	390	721	721
3	Persentase Capaian	100%	63%	0%	102%	100%

Capaian rata-rata dalam 5 tahun (2015-2019) = 100%

Tabel 11
Jumlah Pontren Penerima Bantuan Operasional

No	Uraian	Jumlah Pontren Penerima Bantuan Operasional				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Target	22	22	35	10	22
2	Realisasi	22	22	35	10	22
3	Persentase Capaian	100%	63%	0%	100%	100%

Capaian rata-rata dalam 5 tahun (2015-2019) = 100%

3. Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah, kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan akses, mutu dan relevansi madrasah ini termasuk pengelolaan anggaran pada MIN 1 dan MIN 2 Kota Bandung, tusinya berada dibawah tanggung jawab Seksi Pendidikan Madrasah, selama lima tahun dari 2015-2019 capaian kegiatannya meliputi pelayanan manajemen madrasah dan RA. secara rutin tiap tahunnya, pembinaan standarisasi pendidikan nasional dilakukan rutin kepada guru madrasah setiap tahun (d disesuaikan anggaran), memberikan bantuan dana BOS untuk siswa MI, MTs dan MA sebanyak total rata rata 59.550 siswa/tahun (Siswa MI =45.830 siswa, MTs = 10.020 siswa dan MA=3.700 siswa), BOP untuk RA sebanyak 8.309 siswa/tahun ditahun 2018-2019.

Tabel 12
Jumlah Siswa MI Penerima BOS

No	Uraian	Jumlah Siswa MI Penerima BOS; PIP				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Target	16.464	16.464	13.292	14.961	15.279
2	Realisasi	16.464	14.888	13.292	44.883	45.837
3	Persentase Capaian	100%	97%	100%	300%	300%

Capaian rata-rata dalam 5 tahun (2015-2019) = 178%

Tabel 13
Jumlah Siswa MTs Penerima BOS

No	Uraian	Jumlah Siswa MTs Penerima BOS; PIP				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Target	11.318	13.015	10.239	10.597	10.033
2	Realisasi	11.318	12.659	10.239	10.597	10.033
3	Persentase Capaian	100%	97%	100%	300%	300%

Capaian rata-rata dalam 5 tahun (2015-2019) = 99%

Tabel 14
Jumlah Siswa MA Penerima BOS

No	Uraian	Jumlah Siswa MA Penerima BOS; PIP				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Target	11.318	3.997	3.147	3.781	3.747
2	Realisasi	11.318	3.997	3.147	3.781	3.747
3	Persentase Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian rata-rata dalam 5 tahun (2015-2019) = 100%

Tabel 15
Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi di Madrasah

No	Uraian	Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi pada Madrasah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Target	319	319	655	854	894
2	Realisasi	319	319	655	854	894
3	Persentase Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian rata-rata dalam 5 tahun (2015-2019) = 100%

Tabel 16
Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunj Fungsional di Madrasah

No	Uraian	Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi pada Madrasah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Target	1020	1020	920	400	878
2	Realisasi	1020	591	920	400	878
3	Persentase Capaian	100%	58%	100%	100%	100%

Capaian rata-rata dalam 5 tahun (2015-2019) = 92%

4. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, program kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru ini sejak tahun anggaran 2018-2019 menampung khusus penanganan guru non PNS yang di Madrasah yang bukan guru PAI disekolah umum, guru PAI disekolah umum belum tersedia anggaran tunjangan kinerjanya pada masa tahun 2015-2019. Pelayanan lainnya adalah untuk pelayanan perkantoran selama 12 bulan setiap tahunnya.
5. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, kegiatan ini untuk melayani administrasi manajemen kependidikan secara umum sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan operasional perkantoran, capaian dalam tahun 2015-2019 telah mengelola dan membayarkan gaji dan operasional perkantoran setiap bulan kepada tenaga pengelola kependidikan dilingkungan Kementerian Agama Kota Bandung

1.1.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Tingkat Kota Bandung

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu program prioritas pembangunan dibidang agama dan sering kali diposisikan sebagai salah satu indikator kinerja Kementerian Agama.. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui pelayanan satu atap dengan Bank persepsi, pengembangan sistem pendaftaran haji, optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji, rasionalisasi dan pembinaan BPIH, peningkatan kualitas laporan keuangan haji.

Selama tahun 2015 s.d 2019 pelayanan pendaftaran haji selalu menjadi sorotan masyarakat khususnya terkait dengan setoran biaya haji dengan Bank. Kementerian Agama Kota Bandung telah berupaya memperbaiki pelayanan pendaftaran haji melalui pelayanan pendaftaran satu atap yaitu dengan menjadikan lokasi khusus di dilingkungan gedung Kantor Kemenag untuk pelayanan pendaftaran calon jamaah haji dan Bank Persepsi untuk pembayaran langsung dilokasi Kantor Kemenag Kota Bandung.

Pelayanan pendaftaran haji satu atap dengan Bank Persepsi diharapkan para calon jamaah haji tidak harus bolak balik ke Bank dan menghemat waktu serta memudahkan komunikasi dengan pihak Bank. Apabila ada kekurangan/kesalahan akan mempermudah komunikasinya dan cepat informasinya.

Peningkatan indeks dari tahun ke tahun merupakan usaha yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dilakukan dengan program sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji, tujuan dari program ini dimaksudkan sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan

pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu sejak tahun 2016 Kantor Kementerian Agama Kota Bandung telah memiliki gedung Pelayanan Haji Satu Atap. Hal itu merupakan sebuah upaya meningkatkan pelayanan bidang keagamaan pada masyarakat khususnya untuk tata kelola pelayanan pendaftaran ibadah haji. Masyarakat dalam proses pendaftaran haji yang semula jemaah haji membuka tabungan di Bank penerima setoran (BPS) biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) lalu mendaftar di kemenag domisili, selanjutnya kembali ke BPS BPIH untuk cetak nomor porsi dan kembali lagi ke kemenag domisili untuk menyampaikan bukti cetak tersebut. Cara ini melelahkan calon jemaah. dengan adanya pelayanan haji terpadu maka proses itu akan dipangkas menjadi lebih singkat dan mudah. dimana seluruh proses pendaftaran haji oleh jemaah dapat dilakukan seluruhnya di kantor kemenag kota Bandung. dan hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pendaftaran haji bagi jema'ah.

Capaian dalam pelayanan pengelolaan urusan penyelenggaraan haji dan umroh selama tahun 2015-2019 adalah :

1. Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, untuk pelaksanaan kegiatannya dicapai melalui Kegiatan Haji Dalam Negeri, yaitu dari mulai pendaftaran, proses dokumen perlengkapan ibadah haji, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kota Bandung. Jumlah pelayanan perlengkapan jemaah haji berupa visa dan paspor selama 5 tahun mencapai 10.902 dokumen visa paspor, atau rata rata 2.180 paspor/tahun. Laporan dan rekonsiliasi data pendaftaran dan pembatalan jemaah reguler rata-rata 12 dokumen/tahun.

Tabel 17
Jumlah Pendaftaran dan Pembinaan Haji

No	Uraian	Jumlah Pelayanan Pendaftaran, Visa Paspor dan Pembinaan Jemaah Haji				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Target	1.750	1.750	2.000	2.468	2.474
2	Realisasi	1.750	2.000	2.210	2.468	2.464
3	Persentase Capaian	100%	114%	111%	100%	99,6%

Capaian rata-rata dalam 5 tahun (2015-2019) = 105%

2. Pembinaan Haji, setiap tahun mengadakan seleksi calon petugas haji tingkat Kota Bandung dan menghasilkan calon petugas haji sebanyak 12 orang/tahun. Jumlah bimbingan manasik haji rata rata mencapai 2.180 orang/tahun, untuk tahun 2019 mencapai 2.464 orang. Pemberangkatan jemaah haji tahun 2019 realisasinya mencapai 2.605 jemaah karena adanya mutasi dari daerah daerah lain yang berangkat dari Kota Bandung.
 1. Rapat Evaluasi & Rapat Penyelenggaraan Ibadah Haji
 2. Pengelolaan Siskohat



Gambar 8
Bimbingan Manasik Haji

1.1.6 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintah yang Bersih dan Berwibawa

Sebagai wujud layanan ketata usahaan dilingkungan Kementerian Agama Kota Bandung dilaksanakan tersendiri oleh Sub Bagian Tata Usaha, bentuk pengelolaan administrasinya dicapai melalui pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementrian Agama dan Program Kerukunan Umat Beragama, kegiatan pengelolaan ini dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sasaran kegiatannya adalah pelayanan dibidang keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan organisasi, perencanaan anggaran, kehumasan dan operasional umum perkantoran dilingkungan Kementerian Agama Kota Bandung. Capaian selama tahun 2015-2019 adalah :

- 1) Terlaksananya pembinaan administrasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi anggaran dengan hasil output 3 layanan/tahun atau 45 layanan selama lima tahun sudah tercapai 100%.
- 2) Terlaksananya Administrasi Keuangan dan BMN, seperti pembayaran Gaji dan Tunjangan, layanan manajemen keuangan/pelaporan dll, layanan pengelolaan BMN, selama 5 tahun (14 pelayanan/tahun) atau 70 pelayanan selama lima tahun, sudah tercapai rata-rata mencapai 98% dari sisi anggaran dan dari sisi kinerja sudah tercapai 100%.
- 3) Terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian/manajemen SDM, administrasi hukum, administrasi organisasi dan tatalaksana, selama lima tahun capaiannya 12 pelayanan/tahun, secara kinerja sudah tercapai 100%.
- 4) Terlaksananya pelayanan informasi keagamaan dan kehumasan selama 5 tahun dilingkungan Kementerian Agama Kota Bandung, tercapai 100%.
- 5) Terlaksananya pelayanan pembinaan administrasi umum, berupa layanan perkantoran selama 5 tahun, yaitu 12 bulan/tahun dilingkungan Kementerian Agama Kota Bandung, tercapai 100%.

Tabel 18
Data Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2019

No	Ruang/Golongan	Ruag/Gol	Jumlah	%
Golongan IV (Pembina)				
1	Pembina Utama	IV/e	0	0,00%
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0,00%
3	Pembina Utama Muda	IV/c	4	0,37%
4	Pembina Tk I	IV/b	81	7,44%
5	Pembina	IV/a	344	31,62%
Total			429	39,43%
Golongan III (Penata)				
1	Penata Tk I	III/d	215	19,76%
2	Penata	III/c	152	13,97%
3	Penata Muda Tk I	III/b	133	12,22%
4	Penata Muda	III/a	98	9,01%
Total			598	54,96%
Golongan II (Pengatur)				
1	Pengatur Tk I	II/d	5	0,46%
2	Pengatur	II/c	12	1,10%
3	Pengatur Muda Tk I	II/b	11	1,01%
4	Pengatur Muda	II/a	29	2,67%
Total			57	5,24%
Golongan I (Juru)				
1	Juru Tk I	I/d	2	0,18%
2	Juru	I/c	1	0,09%
3	Juru Muda Tk I	I/b	0	0,00%
4	Juru Muda	I/a	1	0,09%
Total			4	0,37%
Jumlah Pegawai			1088	100%

PNS penerima tunjangan profesi dan tunjangan fungsional, pada tahun 2016 ada penurunan pencapaian jumlah penerimanya karena perubahan regulasi/ kebijakan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian barat selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan Bandung Raya adalah salah satu wilayah metropolitan yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang) merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbangkertosusila (akronim dari Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan adalah sebuah kawasan metropolitan di Provinsi Jawa Timur)

Kota Bandung dihuni oleh masyarakat yang majemuk, dan memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Oleh karena itu Kemenag dan Pemkot Bandung akan terus berupaya menghadirkan sebuah kehidupan berlandaskan keagamaan bagi seluruh warga Kota Bandung. Budaya silaturahmi antar pemeluk agama dimasyarakat berjalan sangat harmonis, mereka rukun aman, Potensi kerukunan pemeluk agama di masyarakat tersebut menjadi modal positif dalam membangun daerah. Adanya ikon Kota Toleransi dan *Bandung Agamis* akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar daerah dan sekaligus tantangan untuk tetap menjaga keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat.

Potensi Kota Bandung sebagai kota agamis seyogyanya bisa diapresiasi oleh Kementerian Agama Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanannya dalam bidang agamasehingga tetap bisa menjaga pembangunan dan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Bandung. Pembangunan bidang agama untuk periode lima tahun mendatang (2020-2024) mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan agama harus ditangani dengan mengacu pada kebijakan Menteri Agama RI. Adapun kebijakan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat mempetakan berdasarkan lima isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif

1.2.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama Dalam Menjalankan Ibadah

Potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah masyarakat kota Bandung, antara lain:

1. Pola hubungan antara agama yang harmonis dan wujud kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada, hal ini menunjukkan keserasian antara nilai- nilai

agama yang moderat dan toleran, hasil penelitian di Universitas Pajajaran tk toleransi dalam kehidupan beragama kota Bandung di level tinggi.

2. Tiingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan yang cukup tinggi . Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran dan penyuluhan keagamaan secara mandiri di masyarakat.

Permasalahannya terkait isu strategis peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah adalah antara lain :

1. Masyarakat sering memaksakan pendirian tempat ibadah tanpa memperdulikan prosedur ketentuan/regulasi yang berlaku.
2. Banyak masyarakat yang terjebak dalam isu hoak dari media sosial, isu ini diolah sedemikian rupa oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi/kelompoknya saja.

Berikut merupakan gambaran potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendorong dalam peningkatan peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah masyarakat kota Bandung.

Tabel 20
Analisis SWOT Kualitas Umat Beragama

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Hubungan antara agama dikota Bandung yang harmonis.	Menjaga/mempertahankan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.	Jumlah Penyuluh Agama PNS hanya 104 orang, minimal 302 orang.	Peran penyuluh agama PNS selama ini dibantu oleh Honorer yang tunjangannya masih jauh dibawah UMR, artinya cukup rawan terhadap kestabilan kualitas kinerjanya.
2. Partisipasi masyarakat/tokoh agama dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan yang cukup tinggi.	Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV, instagram, internet, e-koran, memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan, perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan.	Belum adanya sistem pengendalian dan monitoring dalam penyiaran pesan pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini.	Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohaniwan dan tokoh tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berakibat kepada pendangkalan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama

1.2.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama Dan Kerukunan Umat Beragama

Potensi yang dapat mendukung upaya penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama antara lain:

1. Bandung memiliki ciri heterogenitas secara sosial, dalam kedudukannya sebagai pusat pemerintahan di Jawa Barat juga kota pendidikan banyak dihadiri para urban, kehadiran para pendatang/urban yang terdidik membawa sisi positif dalam mengimplementasikan moderasi beragama, bersosialisasi tinggi dan rasional.
2. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.
3. Telah terbentuk FKUB Kota Bandung dan KUB. Kota Bandung serta lembaga-lembaga sejenis seperti Forum Komunikasi Lintas Agama (FKLA), Forum Dialog (Forlog), Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan lainnya.
4. Keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang berpendidikan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan.
5. Jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan yang berbasis *peace journalism*.

Permasalahannya terkait isu strategis penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama adalah banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik beragama yang berlebihan, tidak terlalu literal, atau menjadi liberal; Beberapa masyarakat memahami agama hanya dari internet (google) yang belum tentu benar sumbernya atau interpretasi yang salah dari arti/maksud sumber rujukan dimaksud; Isu meningkatnya kelompok radikalisme dan liberalism; Adanya kelompok sempalan dan paham keagamaan yang menyimpang (Syiah); Masalah menguatnya fanatisme mazhab; Resistensi ormas Islam terhadap peran pemerintah.

1.2.3 Peningkatan Umat Beragama Yang Menerima Layanan Keagamaan

Potensi yang dapat mendukung peningkatan umat beragama yang menerima pelayanan keagamaan, antara lain:

1. Struktur organisasi Kementerian Agama yang penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA). meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum.
2. Kota Bandung mempunyai 30 Kantor Urusan Agama yang tersebar di 30 Kecamatan se Kota Bandung, jumlah seluruh pegawai di KUA Kecamatan mencapai 205 orang PNS dan penyuluh agama berjumlah 104 orang PNS dan 242 penyuluh agama honorer.
3. Dana dan asset sosial keagamaan yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Bandung adalah Zakat dan wakaf, keduanya merupakan asset dan sumber dana yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengentaskan kemiskinan.

- a) Adanya lembaga pengelola zakat dan wakaf secara mandiri dan independen berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Infaq dan sadaqah merupakan potensi yang tidak kalah besarnya di bandingkan dengan zakat dan wakaf.
 - b) Sarana ibadah dan lembaga – lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, sebagian besar dibangun secara swadaya dan swadana oleh masyarakat melalui media transaksi amal jariah berupa infaq dan sadaqah.
4. Pelayanan Haji, sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain :
- a) Tersedianya peraturan perundang undangan khusus Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - b) Dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji
 - c) Tingginya animo masyarakat kota Bandung untuk melaksanakan ibadah haji yang mencerminkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.
 - d) Akses jaringan teknologi yang mendukung sehingga informasi berkembang cepat.

Permasalahannya terkait isu strategis mendukung peningkatan umat beragama yang menerima pelayanan keagamaan adalah : Keberadaan dan Status KUA. (Infrastruktur KUA) belum sesuai standar; Produk Halal belum tertangani terkait SOTK. yang kurang machh. antara pusat, kanwil dan daerah; Resistensi ormas Islam terhadap peran pelayanan pemerintah; Pendaftaran haji melalui Siskohat kadang-kadang of line atau loading yang menyebabkan pelayanan pendaftaran menjadi lama dan terhambat; Rekomendasi Umroh dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan rekomendasi untuk umroh belum bisa ditunjang dengan anggaran operasional yang memadai.

1.2.4 Peningkatan Budaya Birokrasi Kepemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif

Potensi yang dapat mendukung perwujudan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung adalah:

1. Sarana prasarana untuk pelayanan keagamaan cukup memadai dan merata ke berbagai wilayah sampai tk. Kecamatan.
2. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai sudah berjalan lebih profesional.
3. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama;
4. Penerapan teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program;
5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan;
6. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.

Permasalahannya pada peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung adalah : SOP belum selaras dengan proses bisnis yang ditetapkan dan belum dievaluasi disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi secara berkala; Perhitungan formasi jabatan belum menunjang kinerja dikaitkan dengan kinerja organisasi; Belum dilakukan monev capaian kinerja individu; Pemberian sanksi dan imbalan baru sebagian dilaksanakan belum

konsisten; Belum diperoleh bukti bahwa SIMPEG digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM; Keterlibatan pimpinan belum optimal dalam penyusunan renstra dan perjanjian kinerja; Peningkatan kapasitas SDM dibidang akuntabilitas kinerja belum dilakukan secara optimal.

1.2.5 Peningkatan Peserta Didik Yang Memperoleh Layanan Pendidikan Berkualitas

Pendidikan Agama akan mampu menjadikan manusia menjadi insan cerdas dan beriman, dengan pendidikan agama yang benar dan pemahaman agama yang mendalam akan menjadikan perilaku mereka terarah dan jauh dari hal sia-sia.

Pendidikan Agama implementasinya diberikan di madrasah-madrasah/sekolah. Pendidikan agama seharusnya menjadi pelajaran utama jika ingin mencetak generasi unggul pembawa perubahan, karena para tunas bangsa ini di semai di madrasah/sekolah. Nutrisi yang baik akan menjadikan mereka tumbuh dan berkembang dengan baik yang akan menjadikan mereka pribadi tangguh berbudi pekerti luhur.

Potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas adalah :

1. Peran tinggi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah, dan pendidikan tinggi keagamaan;
2. Kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara dengan pendidikan pada sekolah umum;
3. Sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.
4. Bidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum seperti Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik semakin meningkat.
5. Adanya wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama.

Permasalahannya banyak masyarakat dan sebagian pejabat pembuat kebijakan dipemerintahan masih memandang dunia pendidikan agama sebagai yang nomer dua dalam pendidikan formal, terkait isu strategis dapat mendukung upaya peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas adalah: Masih lemahnya kualitas, kompetensi dan profesionalitas guru; Masih rendahnya kualitas jaminan pelayanan pendidikan; Masih lemahnya pelaksanaan kurikulum; Masih lemahnya system penilaian pendidikan; Masih belum maksimal distribusi guru secara merata melalui pemetaan guru; Masih minimnya RA terakreditasi; Masih lemahnya peran yayasan pengelola termasuk lemahnya SDM pengelola; Masih lemahnya pemerataan diklat guru; Internalisasi dan implementasi Nilai Budaya Kerja warga madrasah masih belum maksimal dan ideal dilaksanakan; Peraturan perundangan yang tidak harmonis/ sinkron dengan kebutuhan pendukung program kegiatan (Pedoman, Juklak, Juknis yang terlambat); Ketepatan fungsi dan ukuran tidak didukung dengan kesesuaian struktur organisasi dengan tumpang tindih fungsi, serta kemampuan struktur organisasi kurang adaptif terhadap perubahan; SOP belum selaras dengan proses bisnis yang ditetapkan dan belum dievaluasi disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan

efektifitas birokrasi secara berkala; Masih banyak lembaga yang tidak patuh mengisi data EMIS.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG

Kementerian Agama Kota Bandung merupakan Instansi Vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia, sesuai PMA nomor 19 Tahun 2019 Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah, Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

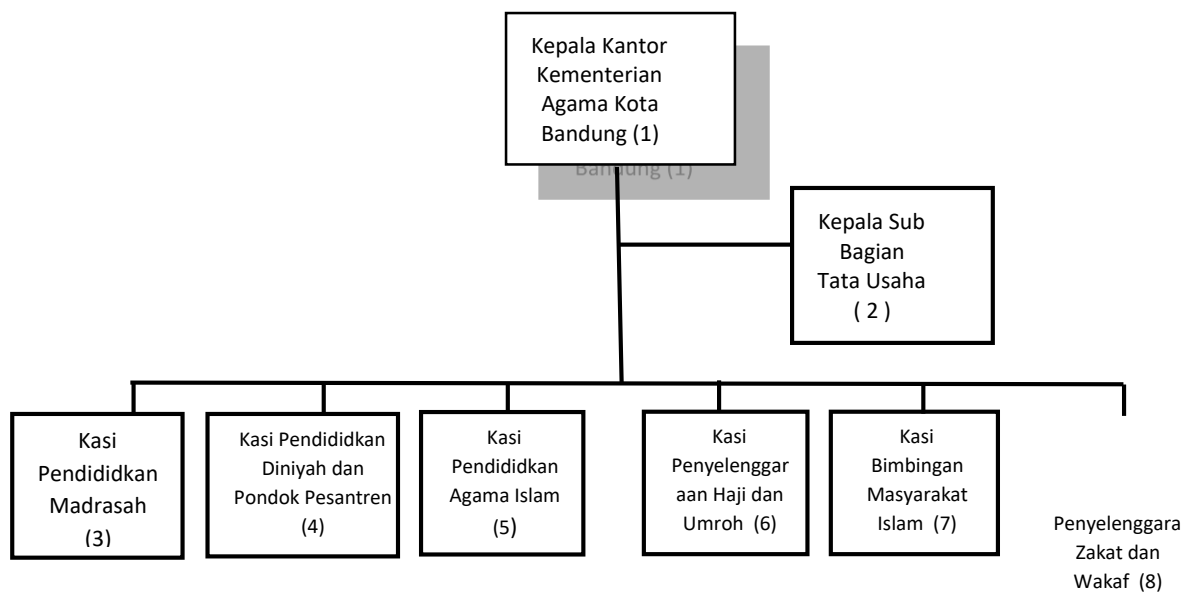
Kantor Kementerian Agama Kota Bandung berkedudukan di Kota Bandung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dipimpin oleh seorang kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

Tugas Kantor Kementerian Agama Kota Bandung melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Bandung berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kota Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di lingkungan Kota Bandung;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf.
- d. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kota Bandung.

Penyatuan visi dan misi serta mempunyai tujuan yang sama bisa diwujudkan melalui organisasi, struktur organisasi Kementerian Agama Kota Bandung sesuai PMA Nomor 19 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Gambar 9
Susunan Organisasi Kementerian Agama Kota Bandung

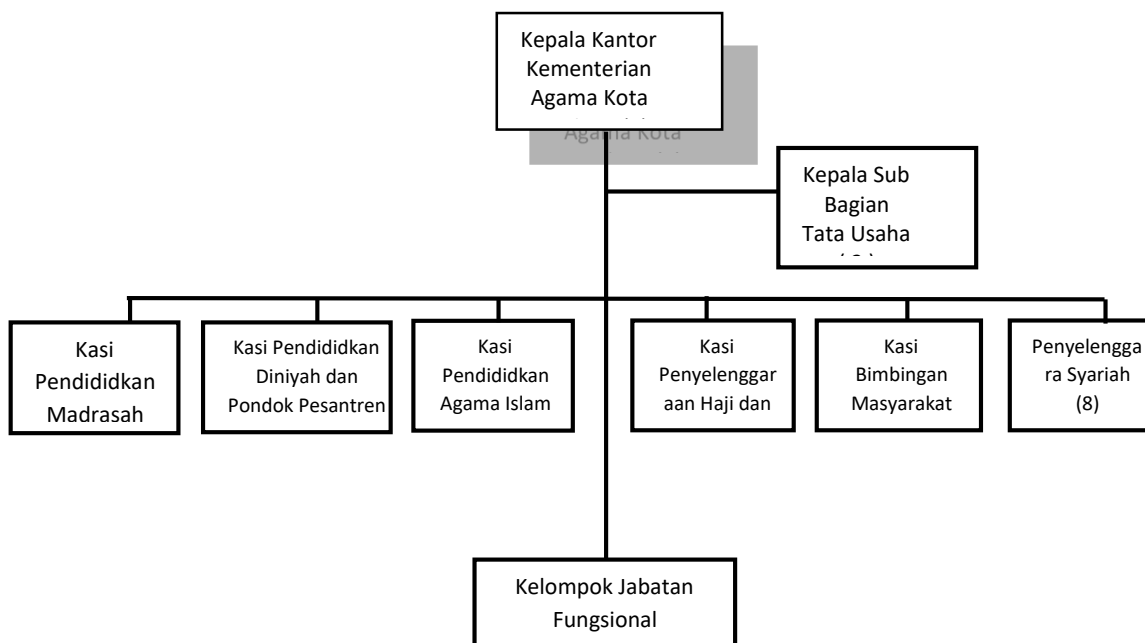
Tugas dan fungsi organisasi Kementerian Agama Kota Bandung sesuai PMA Nomor 19 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Bandung berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi.
- (3) Seksi Pendidikan Madrasah bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan dibidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah.
- (4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren.
- (5) Seksi Pendidikan Agama Islam, bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan dibidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan.
- (6) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di

bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

- (7) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.
- (8) Penyelenggara Zakat dan Wakaf, bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Sampai dengan bulan September tahun 2020 pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung struktur organisasinya masih melaksanakan struktur organisasi sesuai PMA nomor 13 Tahun 2012 sebagai berikut :



Gambar 10
Susunan Organisasi Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Bandung berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan;
- c) Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
- d) Mengelola kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga;

- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lainnya;
 - f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kantor;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (3) Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan madrasah.
- Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi pada RA, MI, MTs dan MA
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pada RA, MI, MTs dan MA
 - c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana pada RA, MI, MTs dan MA
 - d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengembangan potensi kesiswaan pada RA, MI, MTs dan MA
 - e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, serta pengelolaan system informasi pendidikan RA, MI, MTs dan MA
- (4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
- Seksi Pendidikan Diniyah dan pondok pesantren, mempunyai fungsi :
- a) Fungsi *Pelayanan* dibidang Pendidikan Diniyah takmiliyah, Diniyah formal, dan kesetaraan.pendidikan pesantren dan pendidikan Al-Qur'an.
 - b) Fungsi *Bimbingan* dibidang pendidikan diniyah, kesetaraan, dan pendidikan pesantren dan pendidikan Al-Qur'an.
 - c) Fungsi *Pembinaan* dibidang pendidikan diniyah, kesetaraan, pendidikan pesantren dan pendidikan Al-Qur'an.
 - d) Fungsi *Pengelolaan* system informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren serta pendidikan Al-Qur'an
- (5) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK.
- Seksi Pendidikan Agama Islam mempunyai fungsi :
- a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di Seksi pendidikan Agama Islam.
 - b) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB), dan pengelolaan sistem informasi pendidikan Agama Islam.
 - c) Evaluasi dan penyusunan laporan di Seksi pendidikan Agama Islam.

- (6) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan bahan perumusan Visi / Misi
 - b) Melaksanakan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dari mulai pendaftaran, proses dokumen perlengkapan ibadah haji, pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kota Bandung.
 - c) Seleksi Calon Petugas haji tingkat Kota Bandung
 - d) Rapat Evaluasi & Rapat Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - e) Pengelolaan Siskohat
 - f) Pengelolaan keuangan Haji
- (7) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam melakukan fungsi :

- a) Melakukan pendataan rumah Ibadah dan pemeluk Agama
 - b) Membimbing dan meningkatkan kapasitas Imam dan Khotib
 - c) Melaksanakan pembinaan dan pemilihan keluarga sakinah
 - d) Melakukan pembinaan dan bimbingan produk halal
 - e) Melakukan pembinaan dan bimbingan Nikah dan Rujuk
 - f) Mempersiapkan lomba KUA dan Masjid teladan
 - g) Melakukan pelatihan Da'i
 - h) Melakukan festival Qosidah tingkat Kota Metro
 - i) Melakukan TC Qori' / Qori'ah
- (8) Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.

Penyelenggara syari'ah mempunyai fungsi :

- a) Pembinaan dan bimbingan Muallaf
- b) Pembinaan zakat dan wakaf
- c) Layanan konsultasi dan bimbingan syari'ah
- d) Pembinaan hisab ru'yat
- e) Pendataan aliran faham keagamaan
- f) Pembinaan sumpah keagamaan
- g) Koordinasi dengan instansi terkait tentang kegiatan keagamaan

BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 TUJUAN

Kantor Kementerian Agama Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan dibidang agama. Program pembangunan bidang agama dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan pelayanan keagamaan dilaksanakan melalui peningkatan pemahaman pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan pembangunan dibidang keagamaan serta bidang pendidikan agama dan keagamaan dalam wilayah Kota Bandung berdasarkan kebijakan menteri agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pembangunan bidang Agama dan pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan di Kementerian Agama Kota Bandung sesuai dengan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan tusinya adalah :

- 1) Terwujudnya masyarakat Kota Bandung yang taat dalam beragama, adanya peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah
- 2) Terwujudnya Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- 3) Terwujudnya Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan.
- 4) Terwujudnya Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Terwujudnya Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dilingkungan kantor Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.

2.2 SASARAN

Dalam upaya tercapainya tujuan pembangunan bidang agama tidak terlepas dari program kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian Agama Kota Bandung, sasaran program kegiatan harus selaras dengan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, sasaran dari program kegiatan bidang keagamaan sesuai tujuan poin 2.1. dimaksud adalah :

- a. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut :

Tabel 21
Sasaran Kegiatan Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1	Nilai kinerja penyuluh agama
		2	Persentase penyuluh agama yang dibina
		3	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan

- b. Tujuan 2 : Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut :

Tabel 22
Sasaran Kegiatan Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina
		3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina
SK.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama	1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
SK.4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan
SK.5	Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama	1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat
SK.6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina
		2	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya
		3	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan
SK.7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik
SK.8	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1	Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
		2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
		3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
		4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
		5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
		6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
		7	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
		8	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
SK.10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan
SK.12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ,STQ,Ustawa, dll)
SK.13	Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya bernafas Agama	1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina
		2	Jumlah Pengelola perpustakaan agama yang dibina

- c. Tujuan 3 : Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut :

Tabel 23
Sasaran Kegiatan Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
SK.14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan
		2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan
		3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
		4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
		5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
		6	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina
		7	Jumlah POB yang memenuhi standar
SK.15	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1	Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN)
		2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (RM dan PNBP)
		3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah
		4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah
		5	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya
SK.17	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi
		2	Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi
SK.18	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan
		2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu
SK.20	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase petugas haji yang profesional
		2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji
		3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan
		4	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat
SK.21	Meningkatnya Pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1	Persentase keberlanjutan layanan (countinuity service)
SK.22	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase amil yang dibina
		2	Persentase lembaga zakat yang dibina
SK.23	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina
		2	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat

- d. Tujuan 4 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Tabel 24
Sasaran Kegiatan Tujuan 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
SK.24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
		2	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
		3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku
		4	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
		5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan
		6	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan
SK.25	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru dimadrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
		2	Persentase ustadz di pendidikan madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
		3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
		4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan Keagamaan
		5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/madrasah keagamaan
		6	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi
SK.26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran
		2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran
SK.27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana
		2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana
		3	Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana
		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana
		5	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya
SK.28	Meningkatnya pemberian bantuan	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
	pendidikan bagi anak kurang mampu daerah afirmasi, dan berbakat	2	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah
		3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah Keagamaan
		4	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah
		5	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional
SK.29	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Sekolah yang tidak Sekolah)	1	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan dipesantren
SK.30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	1	Jumlah siswa RA/ Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP

- e. Tujuan 5 : Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Tabel 25
Sasaran Kegiatan Tujuan 5

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru madrasah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi
		2	Persentase guru muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi
		3	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi
		4	Persentase kepala/guru/tenaga pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
		5	Persentase Guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG
		6	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi
SK.33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
		2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
SK.34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG
		3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1
SK.35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/Muadalah /sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
SK.36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/ PDF/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
SK.37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/ SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
		2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman
		3	Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak

- f. Tujuan 6 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Tabel 26
Sasaran Kegiatan Tujuan 6

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
SK.39	Meningkatnya kualitas layanan dan	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan

No	Sasaran	Indikator Kinerja
	bantuan hukum	2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan
		3 Jumlah Penyuluhan hukum yang dilaksanakan
		4 Persentase rekomendasi izin orang asing
SK.40	Meningkatnya Kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhsn satuan kerja
		2 Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan
		4 Persentase data ASN yang diupdate
SK.41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib berdasarkan regulasi yang berlaku	1 Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu
		2 Persentase satker yang telah menerapkan pengelolaan Pengendalian Intern pelaporan keuangan (PIPK)
		3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal
SK.42	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntable	1 Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
		2 Persentase tanah yang bersertifikat
		3 Persentase Nilai Opname Fisik BMN
SK.43	Meningkatnya Kualitas penataan dan penguatan manajemen indikator kinerja kegiatan	1 Persentasi satuan kerja/organisasi yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis
		2 persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi
		3 Persentase Administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
SK.44	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	1 Persentase yang telah dilakukan implementasi RB
		2 Satker yang dibina dalam peningkatan Zona Integritas
		3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja
SK.45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data
		2 Persentase Keselarasan muatan Renja dengan renstra
SK.46	Meningkatnya Kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas
		2 Persentase Rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti
SK.47	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana kantor	1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar
SK.48	Meningkatnya Kualitas tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang dan jasa	1 Persentase surat masuk masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui e disposisi
		2 Persentase menurunnya gagal lelang
		3 Persentae menurunnya sanggah dan sanggah banding
SK.49	Meningkatnya Kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1 Persentase kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan
SK.50	Meningkatnya Kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi
		2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter
SK.51	Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi	1 Jumlah Sistem informasi yang memenuhi standar
		2 Persentase data yang valid dan reliable
SK.52	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan	1 Jumlah Pengawas, Guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020-2024

Tabel 27
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kota Bandung

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK	
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1	Nilai kinerja penyuluh agama	1	Nilai kinerja penyuluh agama	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
		2	Persentase penyuluh agama yang dibina	2	Jumlah penyuluh agama yang dibina			Triwulan
		3	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi			Triwulan
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	1	Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100%	KUB	KUB	Tahunan
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina			
		3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina			
SK.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama	1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	1	Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah layanan Sekber FKUB dikali 100%	KUB	KUB	Tahunan
SK.4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dikali 100%	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
SK.5	Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama	1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	1	Jumlah penyuluh agama yang berwawasan moderat dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100%	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
SK.6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	1	Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
		2	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	2	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi jumlah pengelola rumah ibadah dikali			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK		
			100%					
		3	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya			
SK.7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
SK.8	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	1	Jumlah siswa di madrasah/ sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi siswa di madrasah/sekolah keagamaan dikali 100%	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Tahunan
		2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	2	Jumlah siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di madrasah dikali 100%			
		3	Persentase siswa disekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	3	Jumlah siswa disekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa disekolah umum dikali 100%			
		4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	4	Jumlah guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dikali 100%			
		5	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	5	Jumlah guru/ustadz pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru/ustadz pendidikan agama di sekolah umum dikali 100%			
		6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	6	Jumlah guru/ustadz pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru/ustadz pendidikan agama di			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			sekolah keagamaan dikali 100%			
		7 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	7 Jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah dikali 100%			
		8 Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	8 Jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah keagamaan dikali 100%			
SK.10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1 Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	1 Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	KUB	KUB	Tahunan
SK.12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1 Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ,STQ,Ustawa, dll)	1 Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ,STQ,Ustawa, dll)	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Tahunan
SK.13	Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya bernafas Agama	1 Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	1 Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Tahunan
		2 Jumlah Pengelola perpustakaan agama yang dibina	2 Jumlah Pengelola perpustakaan agama yang dibina			
SK.14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Tahunan
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan			
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	3 Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah lembaga keagamaan dikali 100%			
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan			
		5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat			
		6 Jumlah SDM Ahli Falakiyah	6 Jumlah SDM Ahli Falakiyah			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		yang dibina	yang dibina			
		7 Jumlah POB yang memenuhi standar	7 Jumlah POB yang memenuhi standar			
SK.15	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN)	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN)	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (RM dan PNBP)	2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (RM dan PNBP)			
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah			
		4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah			
		5 Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	5 Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan			
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1 Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	1 Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
SK.17	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1 Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	1 Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
		2 Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi	2 Jumlah Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi dibagi jumlah Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dikali 100%			
SK.18	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	1 Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi jumlah pusat layanan haji dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti	2 Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah calon Jemaah haji dikali 100%			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK		
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	1	Jumlah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi jumlah asrama haji dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
		2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	2	Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu dibagi jumlah pelayanan transportasi Jemaah haji dikali 100%			
SK.20	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase petugas haji yang profesional	1	Jumlah petugas haji yang profesional dibagi jumlah petugas haji dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
		2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	2	Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi jumlah Jemaah haji dikali 100%			
		3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	3	Jumlah kasus jemaah haji yang terselesaikan dibagi jumlah kasus jemaah haji dikali 100%			
		4	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	4	Jumlah pembimbing haji yang bersertifikat dibagi jumlah pembimbing haji dikali 100%			
SK.21	Meningkatnya Pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1	Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)	1	Jumlah layanan SISKOHAT yang tidak bermasalah dibagi jumlah layanan SISKOHAT dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
SK.22	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase amil yang dibina	1	Jumlah amil yang dibina dibagi jumlah amil dikali 100%	Penyelenggara Syariah	Penyelenggara Syariah	Tahunan
		2	Persentase lembaga zakat yang dibina	2	Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi jumlah lembaga zakat dikali 100%			
SK.23	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	1	Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi jumlah lembaga wakaf dikali 100%	Penyelenggara Syariah	Penyelenggara Syariah	Tahunan
		2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan (KEMENAG KAB/KOTA)	2	Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi jumlah akta ikrar wakaf dikali 100%			
SK.24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	1	Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi jumlah madrasah dikali 100%	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2 Persentase pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	2 Jumlah pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi jumlah pendidikan diniyah/ muadalah dikali 100%			
		3 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	3 Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku dibagi jumlah sekolah keagamaan dikali 100%			
		4 Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	4 Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan dikali 100%			
		5 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	5 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan			
		6 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	6 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan			
SK.25	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru dimadrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	1 Jumlah guru dimadrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru dimadrasah/ sekolah keagamaan dikali 100%	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Tahunan
		2 Persentase ustadz di pendidikan madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	2 Jumlah ustadz di pendidikan madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi Jumlah ustadz di pendidikan madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
		3 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya	3 Jumlah guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		sebagai dasar penetapan tunjangan	dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%			
		4 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan Keagamaan	4 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan Keagamaan			
		5 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/madrasah keagamaan	5 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/madrasah keagamaan			
		6 Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	6 Jumlah siswa yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa dikali 100%			
SK.26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	1 Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah dikali 100%	Seksi Penmad	Seksi Penmad	Tahunan
		2 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	2 Jumlah mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran dikali 100%			
SK.27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	1 Jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah RA dikali 100%	Seksi Penmad	Seksi Penmad	Tahunan
		2 Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	2 Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah MI dikali 100%			
		3 Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	3 Jumlah MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah MTs dikali 100%			
		4 Persentase MA/Ulya/SMTK/	4 Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah MA dikali 100%			
		5 Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	5 Jumlah Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya dibagi jumlah Madrasah dikali 100%			
SK.28	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Tahunan
		2 Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/ PDF Muadalah	2 Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/ PDF Muadalah			
		3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah Keagamaan	3 Jumlah siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah Keagamaan dibagi jumlah siswa Madrasah dikali 100%			
		4 Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/ PDF Muadalah	4 Jumlah siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/ PDF Muadalah dibagi jumlah siswa Pendidikan Keagamaan dikali 100%			
		5 Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	5 Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional dibagi jumlah pondok pesantren dikali 100%			
SK.29	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Sekolah yang tidak Sekolah)	1 Persentase Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	1 Jumlah Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dibagi jumlah Madrasah dikali 100%	Seksi Penmad, Pontren	Seksi Penmad, Pontren	Tahunan
SK.30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	1 Jumlah siswa RA/ Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	1 Jumlah siswa RA/ Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Tahunan
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru madrasah/ sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	1 Jumlah guru madrasah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi dibagi jumlah guru	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			madrasah/sekolah keagamaan dikali 100%			
		2 Persentase guru muadalah/ sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	2 Jumlah guru muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi dibagi jumlah guru muadalah/sekolah dibagi jumlah guru muadalah/sekolah keagamaan dikali 100%			
		3 Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	3 Jumlah kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah kepala /guru/tenaga kependidikan madrasah dikali 100%			
		4 Persentase kepala/guru/tenaga pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	4 Jumlah kepala/guru/tenaga pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah kepala/ guru /tenaga pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
		5 Persentase Guru Madrasah/ Sekolah Keagamaan yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	5 Jumlah Guru Madrasah/ Sekolah Keagamaan yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG dibagi jumlah Guru Madrasah/ Sekolah Keagamaan dikali 100%			
		6 Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	6 Jumlah Ustadz Pendidikan Diniyah/ Muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG dibagi Jumlah Ustadz Pendidikan Diniyah/ Muadalah dikali 100%			
SK.33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	1 Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi Minimal dibagi jumlah guru dikali 100%	Seksi Penmad, Pais	Seksi Penmad, Pais	Tahunan
		2 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi	2 Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikas dan kompetensi minimal dibagi			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK		
		minimal	Jumlah tenaga kependidikan dikali 100%					
SK.34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	1	Jumlah Guru Madrasah yang mengikuti PPG dibagi jumlah Guru Madrasah dikali 100%	Seksi Penmad, Pais	Seksi Penmad, Pais	Tahunan
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	2	Jumlah guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG dibagi jumlah guru pendidikan dikali 100%			
		3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	3	Jumlah Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 dibagi jumlah Guru Pendidikan Agama dikali 100%			
SK.35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ Muadalah /sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	1	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ Muadalah /sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status Akreditasi dibagi Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ Muadalah /sekolah keagamaan dikali 100%	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Tahunan
SK.36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/ PDF/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	Jumlah siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dibagi jumlah siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF/ sekolah keagamaan dikali 100%	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Tahunan
SK.37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/ SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	1	Jumlah MTs/MA/SMPTK/ SMTK/ SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi jumlah Jumlah MTs/MA/SMPTK/ SMTK/ SMAK/ Pesantren/ Pasraman dikali 100%	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Tahunan
		2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya	2	Jumlah kepala pendidikan diniyah /muadalah yang dibina dalam penerapan budaya			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		belajar yang nyaman dan aman	belajar yang nyaman dan aman dibagi jumlah kepala pendidikan diniyah /muadalah dikali 100%			
		3 Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak	3 Jumlah madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak dibagi jumlah madrasah/ sekolah keagamaan dikali 100%			
SK.39	Meningkatnya kulaitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	1 Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi jumlah produk hukum dikali 100%	TU	TU	Tahunan
		2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	2 Jumlah kasus hukum yang terselesaikan dibagi jumlah kasus hukum dikali 100%			
		3 Jumlah Penyuluhan hukum yang dilaksanakan	3 Jumlah Penyuluhan hukum yang dilaksanakan			
		4 Persentase rekomendasi izin orang asing	4 Jumlah rekomendasi izin orang asing dibagi jumlah rekomendasi izin dikali 100%			
SK.40	Meningkatnya Kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	1 Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja dibagi jumlah dokumen perencanaan ASN dikali 100%	TU	TU	Semester
		2 Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	2 Jumlah penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti dibagi jumlah penyelesaian permasalahan kepegawaian dikali 100%			
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan	3 Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan dibagi jumlah hasil asesmen dikali 100%			
		4 Persentase data ASN yang diupdate	4 Jumlah data ASN yang diupdate dibagi jumlah data ASN dikali 100%			
SK.41	Meningkatnya pengelolaan	1 Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan II yang sesuai	1 Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan II yang sesuai	TU	TU	Semester

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK	
	manajemen keuangan yang tertib berdasarkan regulasi yang berlaku		standar dan tepat waktu				
		2	Persentase satker yang telah menerapkan pengelolaan Pengendalian Intern pelaporan keuangan (PIPK)	2	Jumlah satker yang telah menerapkan pengelolaan Pengendalian Intern pelaporan keuangan (PIPK) dibagi jumlah satker dikali 100%		
		3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	3	Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal dibagi jumlah anggaran dikali 100%		
SK.42	Meningkatnya pengelola BMN yang akuntabel	1	Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	1	Jumlah nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya dibagi jumlah nilai BMN dikali 100%	TU	Semester
		2	Persentase tanah yang bersertifikat	2	Jumlah tanah yang bersertifikat dibagi jumlah tanah dikali 100%		
		3	Persentase Nilai Opname Fisik BMN	3	Jumlah Nilai Opname Fisik BMN dibagi jumlah fisik BMN dikali 100%		
SK.43	Meningkatnya Kualitas penataan dan penguatan manajemen indikator kinerja kegiatan	1	Persentase satuan kerja/ organisasi yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	1	Jumlah satuan kerja/organisasi yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis dibagi jumlah satuan kerja/organisasi dikali 100%	TU	Tahunan
		2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	2	Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi dibagi jumlah laporan kinerja dikali 100%		
		3	Persentase Administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	3	Jumlah Administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah administrasi hasil pengawasan dikali 100%		
SK.44	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	1	Persentase yang telah dilakukan implementasi RB	1	Persentase yang telah dilakukan implementasi RB	TU	Tahunan
		2	Satker yang dibina dalam peningkatan Zona Integritas	2	Satker yang dibina dalam peningkatan Zona Integritas		
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk	3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasika		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK		
			mengimplementasikan program kerja	program kerja				
SK.45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	1	Jumlah output perencanaan yang berbasis data dibagi jumlah output perencanaan dikali 100%	TU	TU	Tahunan
		2	Persentase Keselarasan muatan Renja dengan renstra	2	Jumlah Keselarasan muatan Renja dengan renstra dibagi jumlah muatan renstra dikali 100%			
SK.46	Meningkatnya Kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	1	Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas dibagi jumlah laporan capaian kinerja dikali 100%	TU	TU	Tahunan
		2	Persentase Rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	2	Jumlah Rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional dikali 100%			
SK.47	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana kantor	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar	1	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar dibagi jumlah sarana dan prasarana kantor dikali 100%	TU	TU	Triwulan
SK.48	Meningkatnya Kualitas tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang dan jasa	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui e disposisi	1	Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui e disposisi dibagi jumlah surat masuk dikali 100%	TU	TU	Triwulan
		2	Persentase menurunnya gagal lelang	2	Jumlah menurunnya gagal lelang dibagi gagal lelang dikali 100%			
		3	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	3	Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding dibagi sanggah dan sanggah banding dikali 100%			

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK	
SK.49	Meningkatnya Kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1	Persentase kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan	1	Jumlah kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan dibagi jumlah tamu dikali 100%	TU	TU	Triwulan
SK.50	Meningkatnya Kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	TU	TU	Semester
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	2	Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter dibagi jumlah pemberitaan negative dikali 100%			
SK.51	Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi	1	Jumlah Sistem informasi yang memenuhi standar	1	Jumlah Sistem informasi yang memenuhi standar	TU	TU	Semester
		2	Persentase data yang valid dan reliable	2	Jumlah data yang valid dan reliable dibagi jumlah data dikali 100%			
SK.52	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan	1	Jumlah Pengawas, Guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	1	Jumlah Pengawas, Guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	TU	TU	Triwulan

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 TARGET KINERJA

Program Kerja lima tahun mendatang (tahun 2020-2024) dituangkan dalam Target Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Bab III ini. Pada prinsipnya target kinerja merupakan rencana strategis yang akan dicapai dilingkungan Kementerian Agama Kota Bandung melalui Program kegiatan lima tahunan dibidang agama, pendidikan agama dan keagamaan, pelayanan haji, dan dukungan menejemen tata kelolaan pemerintahan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama. Program-program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan target sasaran yang selaras dengan output program kegiatannya, indikator target tersebut harus terukur dan ada batasan waktu untuk mempermudah mengevaluasi pencapaian dari rencana kinerja dimaksud. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan dari mulai kemampuan/kekuatan yang ada (input), digunakan untuk apa keluarannya (output) hingga hasil dari kegiatan dimaksud (outcome) harus selaras dengan target kegiatan terkait.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan Kementerian Agama pada tahun 2020 Kementerian Agama memiliki strategi melalui 12 Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Pendidikan Islam;
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
8. Program Bimibingan Masyarakat Hindu;
9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama;
12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/ PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5

(lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung sesuai Kebijakan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Tahun 2020 ada 5 Program (dari 12 Program Kementerian Agama RI pada tahun 2020), yaitu :

1. Program Bimbingan Masyarakat Islam
2. Program Pendidikan Islam
3. Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah
4. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama.
5. Program Kerukunan Umat Beragama

3.1.1 Program Bimbingan Masyarakat Islam

Maksud dan tujuan dari program ini outcomenya adalah dalam upaya mewujudkan pelayanan bidang agama untuk masyarakat Kota Bandung yang taat dalam beragama, terjalinnnya kerukunan umat beragama dan melaksanakan kehidupan beragama secara berkualitas baik pribadi maupun kelompok.

Adapun sasaran program dimaksud untuk meningkatkan pengelolaan dan pembinaan urusan agama Islam dan syariah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf, Kantor urusan agama dan Keluarga Sakinah, pencapaian sasaran program dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Output kegiatannya adalah:

- 1) Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf, target 5 lembaga
- 2) Bantuan Operasional BWI, target 5 lembaga
- 3) Bantuan Operasional BAZNAS, target 5 lembaga
- 4) Pengawasan Lembaga Zakat, target 5 lembaga
- 5) Legalitas Tanah Wakaf, target 20 lokasi.

- b. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Output kegiatannya adalah:

- 1) Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS
 - 2) Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas
 - 3) Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist
 - 4) Ormas dan Lembaga Keagamaan
- c. Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Output kegiatannya adalah Layanan Pengelolaan Hisab Rukyat
- d. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
Output kegiatannya adalah Layanan Perkantoran

3.1.2 Program Pendidikan Islam

Maksud dan tujuannya program ini outcomenya adalah upaya untuk mewujudkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Agama Islam.

Sasaran program ini untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan Agama Islam pada sekolah umum dan madrasah, subsidi pendidikan keagamaan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Pencapaian program dimaksud dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Peningkatan Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam
Output kegiatannya adalah :
 - 1) Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
 - 2) Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi
 - 3) Siswa/Mahasiswa, Guru dan Pengawas PAI Berprestasi penerima penghargaan
 - 4) Guru PAI yang meningkat kompetensinya
 - 5) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 6) Layanan Perkantoran
- b. Kegiatan Peningkatan Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam
Output kegiatannya adalah :
 - 1) Layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam
 - 2) Dokumen Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam
 - 3) Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS
 - 4) Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS
 - 5) Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
 - 6) Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP
 - 7) Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP

- 8) Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP
- c. Kegiatan Peningkatan Mutu Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
Output kegiatannya adalah :
 - 1) Layanan Manajemen Madrasah dan RA
 - 2) Dokumen Standar Nasional Pendidikan
 - 3) Siswa MI penerima BOS
 - 4) Siswa MTs penerima BOS
 - 5) Siswa MA penerima BOS
- d. Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Output kegiatannya adalah :
 - 1) Guru Non - PNS penerima Tunjangan Insentif
 - 2) Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi
 - 3) Layanan Perkantoran
- e. Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Output kegiatannya adalah :
 - 1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
 - 2) Layanan Perkantoran [PN]

3.1.3 Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah

Maksud dan tujuan program ini outcomenya adalah upaya untuk mewujudkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas.

Sasaran program ini untuk meningkatkan pembinaan pelayanan haji dan umroh termasuk daya dukungnya dalam pelaksanaan tugas teknis pelayanan haji dan umroh lainnya.

Pencapaian sasaran (output) program dimaksud dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri
Output kegiatannya adalah :
 - 1) Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji
 - 2) Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler
 - 3) Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji
- b. Pembinaan Haji
Output kegiatannya adalah
 - 1) Rekrutmen Petugas haji yang profesional

- 2) Bimbingan Jemaah Haji melalui melalui manasik haji dan pembimbing yang bersertifikat
- c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Output kegiatannya adalah Pelayanan Sarana dan Prasarana perkantoran, Gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan

3.1.4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama.

Maksud dan tujuan program ini outcomenya adalah upaya untuk mewujudkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, dalam rangka penerapan pemerintahan yang baik (good governance)

Sasaran program ini untuk meningkatkan pembinaan pelayanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan BMN, Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana Perkantoran, teknis informasi dan kehumasan, pelayanan umum lainnya diseluruh unit kerja dilingkungan kantor Kemenag. Pencapaian sasaran program (output) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

- a Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
Outputnya : Pembinaan Pelayanan Hukum
- b Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Outputnya : Pembinaan dan Layanan Manajemen SDM
- c Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Outputnya : Pembinaan Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Manajemen BMN, Layanan Perkantoran
- d Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Outputnya : Pembinaan Layanan Manajemen Organisasi
- e Pembinaan Administrasi Perencanaan
Outputnya : Pembinaan Layanan Perencanaan, Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- f Pembinaan Administrasi Umum
Outputnya : Pembinaan
- g Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Outputnya : Pembinaan Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

3.1.5 Program Kerukunan Umat Beragama

Maksud dan tujuan program ini outcamenya adalah upaya untuk mewujudkan pembinaan kerukunan hidup umat beragama oleh Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, sedangkan sasarannya untuk meningkatkan Kualitas FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media. Kegiatannya adalah Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Output kegiatan ini adalah:

- a. Bantuan operasional Sekretariat Bersama FKUB
- b. Pelaksanaan kegiatan kampanye hidup rukun melalui FGD

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian target sasaran digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020-2024

Tabel 28
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Kantor Kementerian Agama Kota Bandung

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2020	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggungjawab IKSK
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama	85	92	Angka	Bimas Islam
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	80	90	%	
		3 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	25	35	Kelompok	
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	80	90	%	KUB
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	10	15	Orang	
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	4	8	Desa	
SK.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama	1 Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	80	90	%	KUB
SK.4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	5	10	Kegiatan	Bimas Islam
SK.5	Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama	1 Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	80	92	%	Bimas Islam
SK.6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	80	92	%	Bimas Islam
		2 Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	28	33	Orang	
		3 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	25	35	Lembaga	
SK.7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	1 Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	120	150	Kegiatan	Bimas Islam
SK.8	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	70	85	%	Seksi Penmad, Pais, Pontren
		2 Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	70	85	%	
		3 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan pendidikan	70	85	%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2020	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggungjawab IKSK
		agama yang bermuatan moderasi beragama				
		4 Presentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	75	85	%	
		5 Presentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	75	85	%	
		6 Presentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	75	85	%	
		7 Presentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	75	85	%	
		8 Presentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	75	85	%	
SK.10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	1 Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	4	10	Kegiatan	KUB
SK.12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1 Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ,STQ,Ustawa, dll)	2	12	Kegiatan	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah
SK.13	Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya bernafas Agama	1 Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	2	5	Direktori	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah
		2 Jumlah Pengelola perpustakaan agama yang dibina	3	6	Lembaga	
SK.14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	20	30	Lembaga	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	100	500	Buah	
		3 Presentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	75	85	%	
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	20	30	Kegiatan	
		5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	365	465	Lembaga	
		6 Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina	20	50	Orang	
		7 Jumlah POB yang memenuhi standar	30	30	Lokasi	
SK.15	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN)	1	5	KUA	Bimas Islam
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana	2	6	KUA	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2020	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggungjawab IKSK
		prasarana (RM dan PNBP)				
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	700	3000	Pasang	
		4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	90	300	Orang	
		5 Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	10000	18000	Buku	
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	1 Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	10	10	Keluarga	Bimas Islam
SK.17	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1 Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	90	100	%	PHU
		2 Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi	95	100	%	
SK.18	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	100	100	%	PHU
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti	100	100	%	
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	100	100	%	PHU
		2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	100	%	
SK.20	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1 Persentase petugas haji yang profesional	100	100	%	PHU
		2 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	%	
		3 Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	80	90	%	
		4 Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	90	100	%	
SK.21	Meningkatnya Pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1 Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)	90	100	%	PHU
SK.22	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina	60	90	%	Penyelenggara Syariah
		2 Persentase lembaga zakat yang dibina	70	90	%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2020	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggungjawab IKSK	
SK.23	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	50	85	%	Penyelenggara Syariah
		2	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	60	90	%	
SK.24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	78	90	%	Seksi Penmad, Pais, Pontren
		2	Persentase pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	80	85	%	
		3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	80	95	%	
		4	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	75	85	%	
		5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	2	6	Lembaga	
		6	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	2	6	Lembaga	
SK.25	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru dimadrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	100	100	%	Seksi Penmad, Pais, Pontren
		2	Persentase ustadz di pendidikan madrasah pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan	100	100	%	
		3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	90	100	%	
		4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan Keagamaan	5	8	Penghargaan	
		5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/madrasah keagamaan	5	8	Kegiatan	
		6	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	75	85	%	
SK.26	Meningkatnya penerapan	1	Persentase madrasah/ pendidikan	80	90	%	Seksi Penmad

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2020	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggungjawab IKSK	
	teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran				
		2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	80	90	%	
SK.27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	80	85	%	Seksi Penmad
		2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	80	90	%	
		3	Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	80	90	%	
		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	80	90	5	
		5	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	50	80	%	
SK.28	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	1000	1200	Siswa	Seksi Penmad, Pais, Pontren
		2	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah	800	1200	Siswa	
		3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah Keagamaan	60	75	%	
		4	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah	60	75	%	
		5	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	-	90	%	
SK.29	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Sekolah yang tidak Sekolah)	1	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan dipesantren	-	85	%	Seksi Penmad, Pontren
SK.30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	1	Jumlah siswa RA/ Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	6500	8500	Siswa	Seksi Penmad, Pais, Pontren
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga	1	Persentase guru madrasah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	70	90	%	Seksi Penmad, Pais, Pontren

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2020	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggungjawab IKSK	
	kependidikan	2	Persentase guru muadalah/ sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	70	90	%	Seksi Penmad, Pais, Pontren
		3	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	75	90	%	
		4	Persentase kepala/guru/tenaga pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	75	90	%	
		5	Persentase Guru Madrasah/ Sekolah Keagamaan yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	20	65	%	
		6	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	-	65	%	
SK.33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	80	90	%	Seksi Penmad, Pais
		2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	80	90	%	
SK.34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	5	10	%	Seksi Penmad, Pais
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	80	90	%	
		3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	100	100	%	
SK.35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ Muadalah /sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	-	3	Lembaga	Seksi Penmad, Pais, Pontren
SK.36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1	Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	40	65	%	Seksi Penmad, Pais, Pontren
SK.37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/ SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80	90	%	Seksi Penmad, Pais, Pontren
		2	Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	80	90	%	
		3	Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak	80	90	%	
SK.39	Meningkatnya kualitas	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	-	70	%	TU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2020	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggungjawab IKSK	
	layanan dan bantuan hukum	2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	60	90	%	
		3	Jumlah Penyuluhan hukum yang dilaksanakan	-	2	Kegiatan	
		4	Persentase rekomendasi izin orang asing	80	90	%	
SK.40	Meningkatnya Kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	82	92	%	TU
		2	Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	82	92	%	
		3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan	82	92	%	
		4	Persentase data ASN yang diupdate	85	95	%	
SK.41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib berdasarkan regulasi yang berlaku	1	Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	2	Laporan	TU
		2	Persentase satker yang telah menerapkan pengelolaan Pengendalian Intern pelapora keuangan (PIPK)	75	85	%	
		3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	100	100	%	
SK.42	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1	Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	80	85	%	TU
		2	Persentase tanah yang bersertifikat	90	100	%	
		3	Persentase Nilai Opname Fisik BMN	70	85	%	
SK.43	Meningkatnya Kualitas penataan dan penguatan manajemen indikator kinerja kegiatan	1	Persentase satuan kerja/organisasi yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	85	95	%	TU
		2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	90	95	%	
		3	Persentase Administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90	95	%	
SK.44	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	1	Persentase yang telah dilakukan implementasi RB	75	90	%	TU
		2	Satker yang dibina dalam peningkatan Zona Integritas	75	90	Jumlah	
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	5	15	Orang	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2020	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggungjawab IKS	
SK.45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	85	95	%	TU
		2	Persentase Keselarasan muatan Renja dengan renstra	80	95	%	
SK.46	Meningkatnya Kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	90	95	%	TU
		2	Persentase Rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	80	85	%	
SK.47	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana kantor	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar	60	85	%	TU
SK.48	Meningkatnya Kualitas tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang dan jasa	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui e disposisi	75	85	%	TU
		2	Persentase menurunnya gagal lelang	10	50	%	
		3	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	10	50	%	
SK.49	Meningkatnya Kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1	Persentase kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan	90	100	%	TU
SK.50	Meningkatnya Kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	50	200	Berita	TU
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	60	85	%	
SK.51	Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi	1	Jumlah Sistem informasi yang memenuhi standar	10	15	Sistem	TU
		2	Persentase data yang valid dan reliable	-	85	%	
SK.52	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan	1	Jumlah Pengawas, Guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	350	450	Orang	TU

3.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumber daya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Dalam Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Bandung 2020- 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung berbasis Rencana Strategis, serta berdasarkan ketentuan dan norma yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan secara nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung sampai dengan 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 29
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan	Rencana Anggaran					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	4.548.276.000	4.239.474.000	4.685.839.000	4.920.129.000	5.166.137.000	23.559.855.000
1)	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		995.000	885.000	929.000	975.000	3.784.000
2)	Pembinaan Administrasi Kepegawaian		6.030.000	5.968.000	6.266.000	6.580.000	24.844.000
3)	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	3.807.871.000	3.376.177.000	3.872.749.000	4.066.386.000	4.269.706.000	19.392.889.000
4)	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Kelola		9.607.000	10.600.000	11.130.000	11.687.000	43.024.000
5)	Pembinaan Administrasi Perencanaan		42.856.000	42.367.000	44.485.000	46.710.000	176.418.000
6)	Pembinaan Administrasi Umum	740.405.000	751.489.000	695.790.000	730.579.000	767.108.000	3.685.371.000
7)	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		7.320.000	7.480.000	7.854.000	8.246.000	30.900.000
8)	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	20.000.000	45.000.000	50.000.000	52.500.000	55.125.000	222.625.000
2	Program Bimbingan Masyarakat Islam	76.104.155.000	92.762.478.000	46.282.768.000	48.596.907.000	51.026.752.000	314.773.060.000
1)	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	4.157.730.000	3.848.890.000	6.242.059.000	6.554.162.000	6.881.871.000	27.684.712.000
2)	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	35.796.854.000	54.001.300.000	2.992.700.000	3.142.335.000	3.299.452.000	99.232.641.000
3)	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		35.550.000	27.000.000	28.350.000	29.767.000	120.667.000
4)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	36.149.571.000	34.876.738.000	37.021.009.000	38.872.060.000	40.815.662.000	187.735.040.000
3	Program Pendidikan Islam	182.269.960.000	75.747.155.000	68.403.757.000	71.823.945.000	77.109.121.000	475.353.938.000
1)	Pengelolaan dan Pembinaan Madrasah	82.640.940.000	5.368.800.000	6.143.400.000	6.450.570.000	6.773.098.000	107.376.808.000
2)	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	32.426.500.000	23.000.000	17.000.000	17.850.000	18.742.000	32.503.092.000
3)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	67.202.520.000	70.355.355.000	62.243.357.000	65.355.525.000	68.623.302.000	333.780.059.000
4	Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.711.561.000	1.578.428.000	1.375.550.000	1.444.327.000	1.516.544.000	7.626.410.000
1)	Pelayanan Umrah dan Haji Khusus	9.950.000	9.500.000	9.940.000	10.437.000	10.958.000	50.785.000
2)	Pelayanan Haji Dalam Negeri	123.265.000	126.190.000	151.000.000	158.550.000	166.477.000	725.482.000
3)	Pembinaan Haji	33.150.000	47.350.000		52.085.000	54.690.000	187.275.000
4)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.545.196.000	1.395.388.000	1.214.610.000	1.275.340.000	1.339.107.000	6.769.641.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020-2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024. Renstra merupakan gambaran peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya dari target kinerja yang sudah direncanakan. Renstra Kementerian Agama Kota Bandung tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 pemerintahan daerah tingkat II dibidang pembangunan agama dan keagamaan.

Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Bandung memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama RI dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama dan pendidikan untuk diaplikasikan tingkat daerah sesuai dengan potensi dan masalahnya di Kota Bandung

Renstra Kementerian Agama Kota Bandung menggambarkan keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, untuk mengetahui target capaian mutu keluaran (output) yang pada akhirnya nanti secara berjenjang ketingkat nasional yang diharapkan menhasilkan (outcome) yang diinginkan guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Sebagai harapan, Renstra Kementerian Agama Kota Bandung ini dapat digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang agama dan pendidikan yang hendak dicapai pada Tahun 2020-2024 tingkat daerah Kota Bandung dan merupakan dasar dan acuan bagi satuan kerja dilingkungan Kementerian Agama Kota Bandung dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program.

Target Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dituangkan dalam rencana strategis ini melalui Program kegiatan lima tahunan dibidang agama, pendidikan agama dan keagamaan, pelayanan haji, dan dukungan manajemen tata kelolaan pemerintahan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan dari mulai kemampuan/kekuatan yang ada (inputs), digunakan untuk apa keluarannya (output) hingga hasil dari kegiatan dimaksud (outcome) harus selaras dengan target kegiatan terkait.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2020-2024 sebagai gambaran pedoman pelaksanaan program kegiatan dan bahan evaluasi pencapaian kinerja

selama lima tahun mendatang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.



Bandung, 31 September 2020
Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Bandung

Dr. H. YUSUF, M.Pd
NIP. 196408041988031001